

Business Sustainability Di Era Ketidakpastian Tinggi

Unair, 15 Juni 2023



Anggota III BPK RI
Prof. Dr. Achsanul Qosasi, CSFA., CFrA., CGCAE.



ACCOUNTABILITY IN A TIME OF CRISIS

How Supreme Audit Institutions and development partners can learn from previous crises and ensure effective responses to Covid-19 in developing countries



Early Warning

PENGUSAHA & POLITIK

Highlighting Areas of Focus in an Evolving Audit Environment Due to the Impact of COVID-19

Global developments relating to the COVID-19 pandemic have also impacted the work of auditors. Uncertainty and unpredictability may create risks of material misstatement that are new, or intensified, in the circumstances. When planning the audit, auditors may not have considered these risks or may have considered identified risks differently.

Entities being audited are adjusting to the changing environment relating to their businesses and operations, including financial reporting processes, disclosures in financial statements and their ability to maintain operations in the foreseeable future.

Similarly, auditors have to adjust how they obtain sufficient appropriate audit evidence on which to base the audit opinion, amid challenges relating to, among other things, access to people or information, revising the identification and assessment of certain risks of material misstatement, and changing planned audit procedures or performing alternative or additional audit procedures as may be appropriate. Auditors may also find that the current circumstances bring opportunities to do things differently, for example, by using new, or flexing the use of existing, technology resources.



Lastly, other changes in the environment and financial reporting chain may also impact the audit, such as changes in the applicable financial reporting standards, changes in laws or regulations, or new transactions for the entity such as the receipt of subsidies.

Changes in how, and where, auditors are undertaking their work may necessitate firms to respond to the changing environment, for example by considering **quality control policies and procedures** relating to direction and supervision of engagement teams and the review of their work. At the engagement level, auditors should have heightened awareness of the possibility of **fraud or error**, including fraudulent financial reporting, with the importance of the exercise of **professional skepticism** top of mind in performing audit procedures.

The following highlights some of the more significant areas that may need to be further considered in designing and performing audit procedures to obtain sufficient appropriate audit evidence, and to report accordingly.



Baru saja COVID-19 selesai kini memasuki Tahun Politik



Program Negara
NAWACITA

Keputusan Politik
Business Plan
Potensi Pasar
Payment

Situasi & Kondisi Usaha

- Program
- Proyek
- Public Service

Negara – Kementerian
Swasta- Pengembangan

BUMN
Perusahaan Swasta

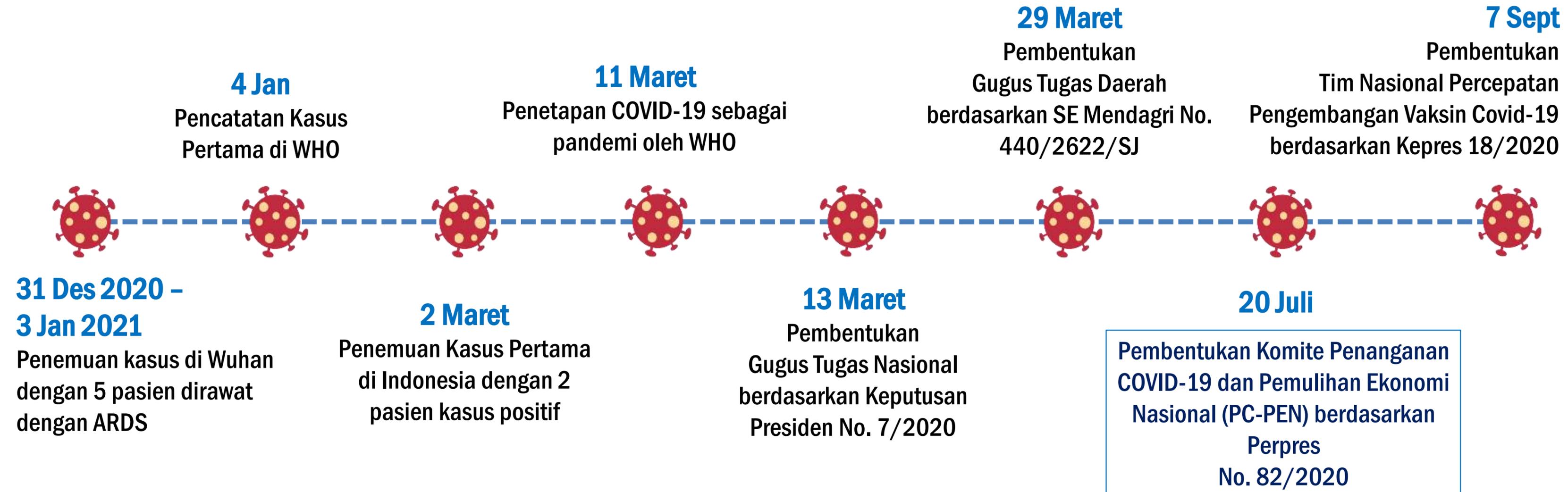
Efisiensi & Efektivitas
Profit & Loss

Risiko Politik



- Janji Politik Calon Penguasa
- Konsistensi Kebijakan
- Perubahan Strategi
- Country Risk – Pandangan Negara Lain

Kronologi Pandemi Covid-19 & Respon Kebijakan di Indonesia

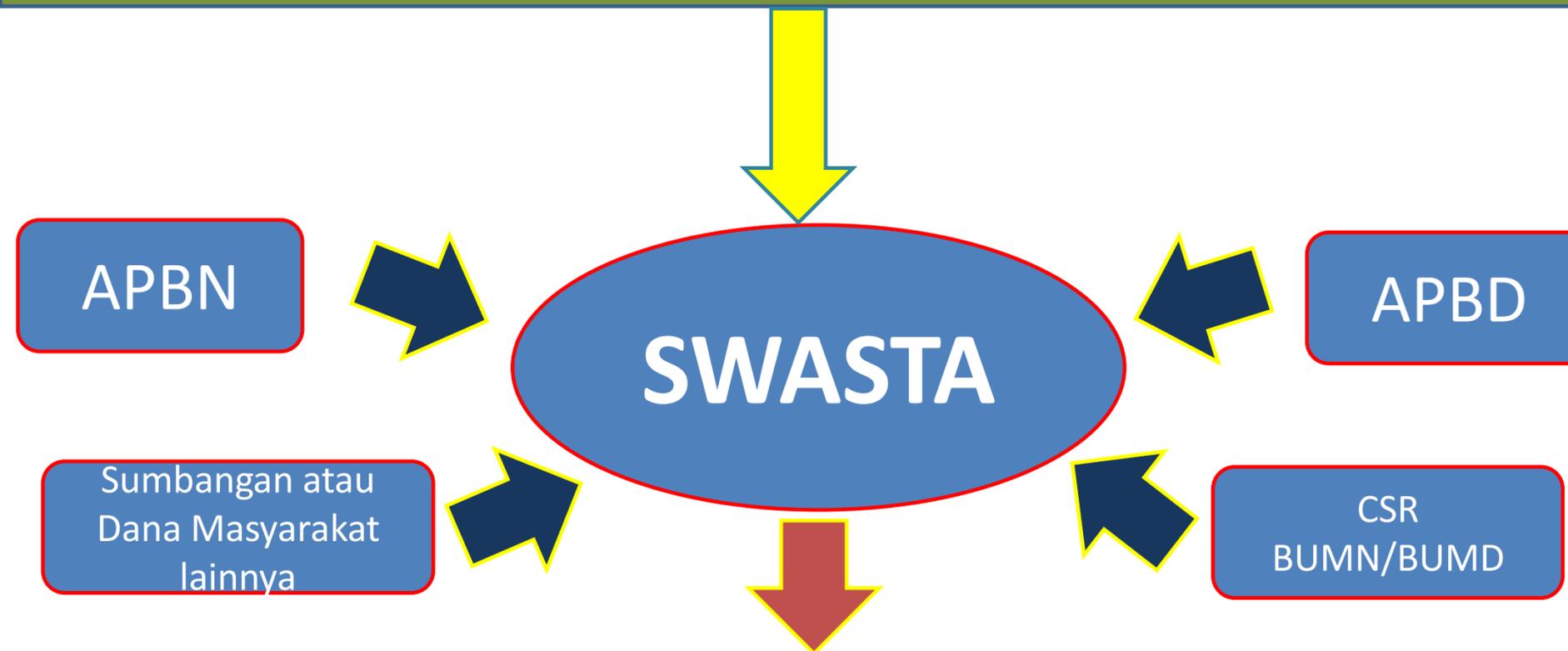
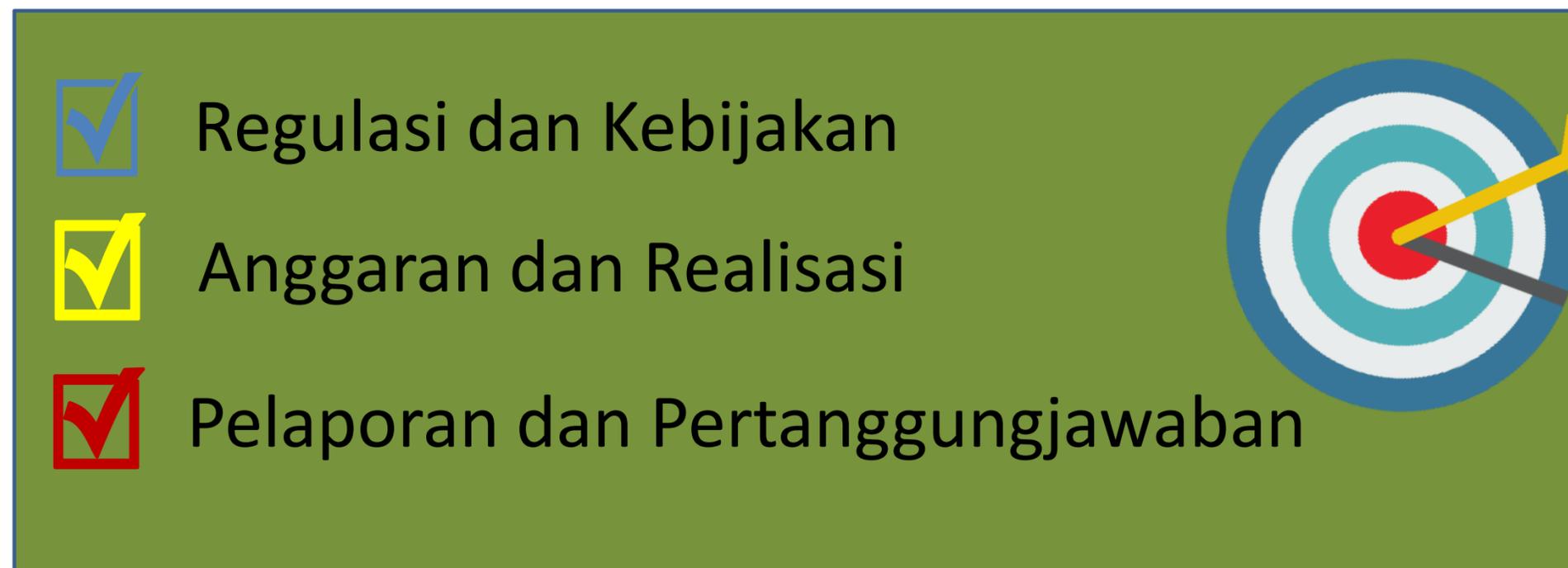


Perjalanan Respon Kebijakan Penanganan Covid-19



Dampak Ketidakpastian Tinggi





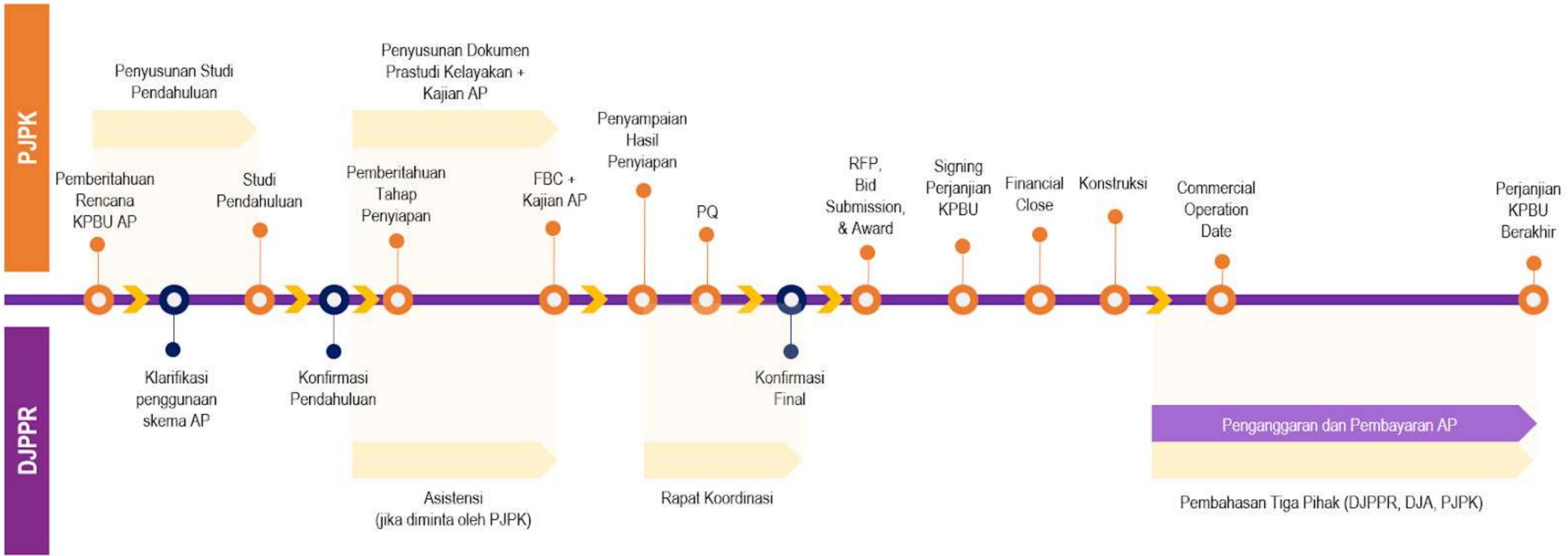
RAKYAT – Target Market

Skema KPBU



- **Kontrak Operasi & Pemeliharaan (*Operation & Maintenance (O&M)*):**
Operator swasta/badan usaha, berdasarkan kontrak, mengoperasikan aset milik Pemerintah (mis. Pabrik pengolahan air/air limbah) untuk jangka waktu tertentu. Kepemilikan aset tetap pada pihak Pemerintah.
- **Bangun-Keuangan (*Build – Finance (BF)*):**
Swasta/badan usaha membangun aset dan membiayai biaya modal hanya selama periode konstruksi.
- **Desain-Bangun-Keuangan-Pelihara (*Design-Build-Finance-Maintenance (DBFM)*):**
Badan usaha merancang, membangun, membiayai aset dan menyediakan layanan pemeliharaan (*hard facilities management*) berdasarkan perjanjian jangka panjang.
- **Desain-Bangun-Keuangan-Pelihara-Operasi (*Design-Build-Finance-Maintain-Operate (DBFMO)*):**
Pihak badan usaha merancang, membangun, membiayai, menyediakan layanan pemeliharaan dan operasi di bawah perjanjian jangka panjang. Pengoperasian aset juga termasuk dalam proyek-proyek seperti ini misalnya pengoperasian jembatan, jalan dan instalasi pengolahan air.
- **Konsesi:**
Seorang pemegang konsesi pihak swasta/badan usaha melakukan investasi dan mengoperasikan fasilitas untuk jangka waktu tertentu, setelah jangka waktu tersebut kepemilikan kembali ke pihak pemerintah.

Tahap Perencanaan KPBU Tahap Penyiapan KPBU Tahap Transaksi KPBU Masa Operasi



1 tahun

1 tahun

2 tahun

>10 tahun

Sementara kita dihadapkan pada berbagai risiko:



RISIKO STRATEGIS

Risiko dalam pencapaian tujuan

RISIKO KECURANGAN DAN INTEGRITAS

risiko yang dialami pemerintah karena adanya tindakan kecurangan, penyalahgunaan wewenang, *free riders* dan *moral hazards*.

RISIKO KEPATUHAN

terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang dapat menimbulkan implikasi risiko hukum atau litigasi.

RISIKO OPERASIONAL

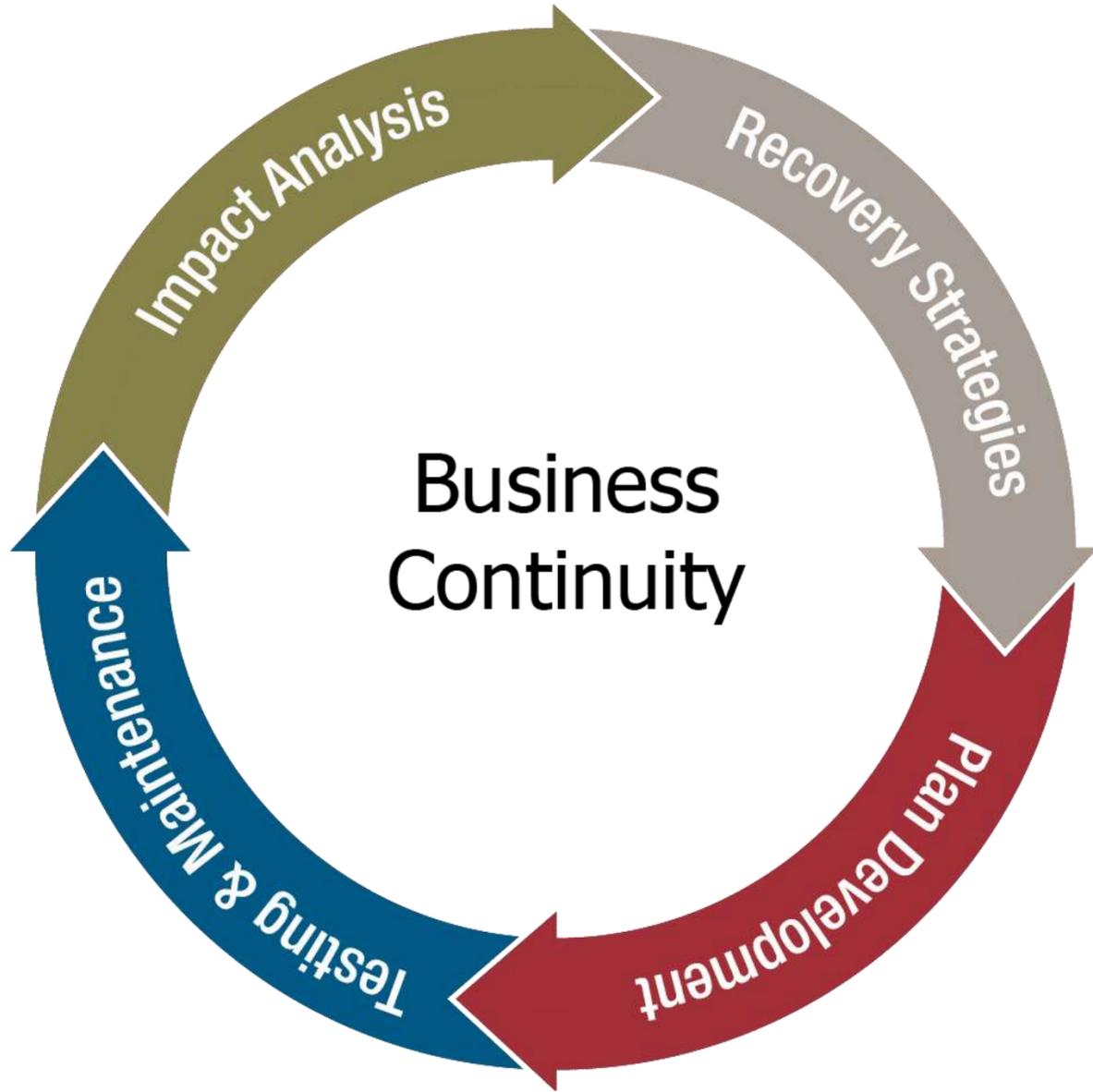
terkait dengan terkendalanya implementasi kebijakan di lapangan karena kompleksitas system & Perubahan Kebijakan

RISIKO KEUANGAN

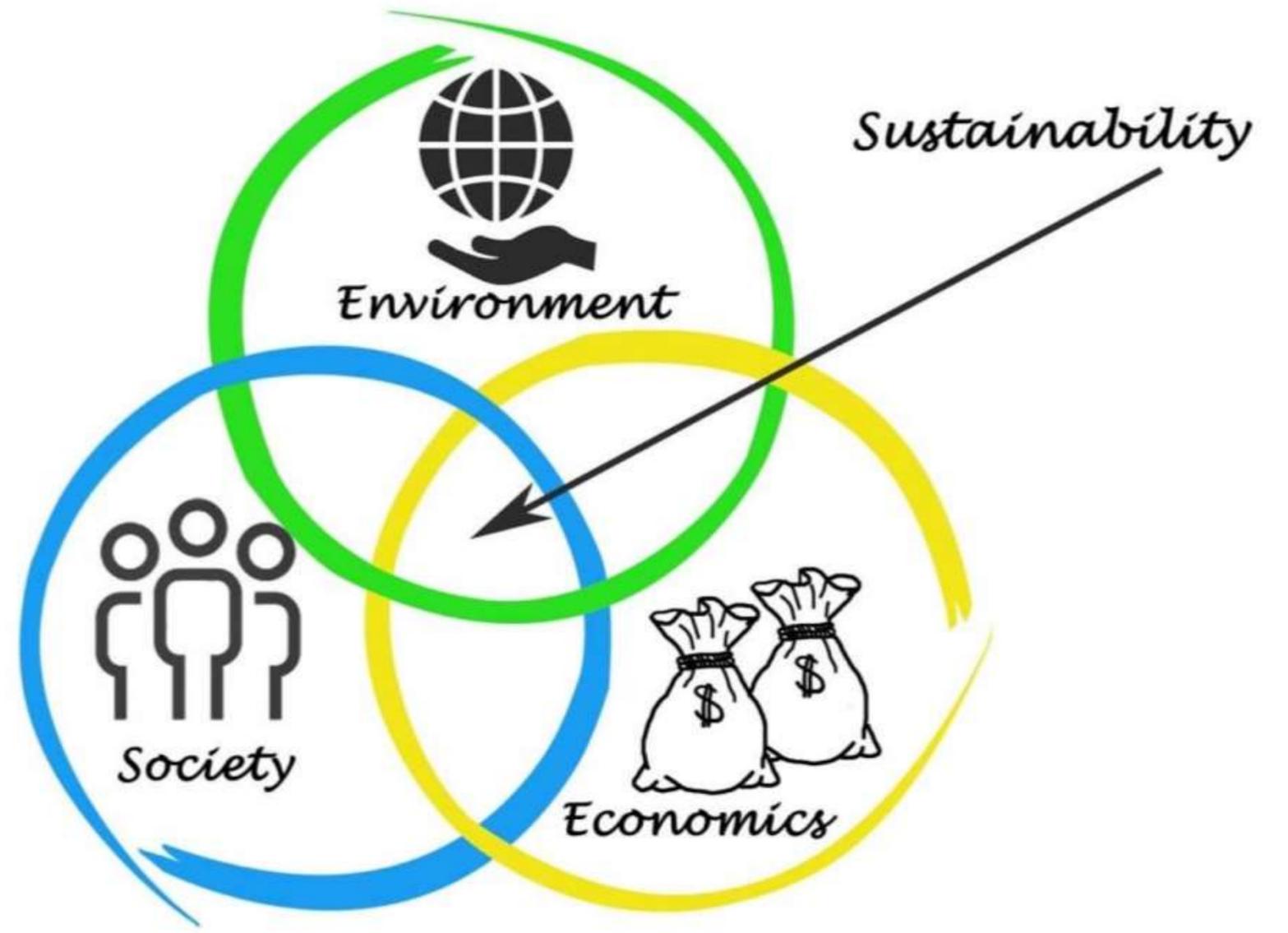
sejauh mana pemerintah menjaga ketergatungan pada pembiayaan eksternal.



Semua Risiko di atas,
berpengaruh terhadap
business sustainability,
terutama kepada sektor
swasta sebagai pelaksana
kegiatan



Influenced : Internal Factor



Influenced : External Factor

PENGUSAHA DUKUNG PENGUASA

- **Kemudahan akses dan kepastian yang menguntungkan**
- **Informasi atas arah kebijakan ekonomi**
- **Kemudahan birokrasi**

RISIKO PEMERIKSAAN



COVID - 19

Politik

- Keterbatasan kapasitas jumlah pemeriksa
- Koordinasi internal terbatas melalui komunikasi online
- Tidak dapat melakukan cek fisik ke lapangan atau ke dokumen manual karena batasan protokol kesehatan
- Kondisi psikologis pemeriksa yang khawatir akan kondisi kesehatan pribadi dan lingkungan

- Perubahan Peraturan
- Keidakpastian kebijakan
- Koordinasi dengan pihak pemangku kepentingan agak sulit



**Kita tidak mungkin mengatasi tantangan ini sendiri-sendiri.
Dibutuhkan kepercayaan (trust), semangat dan kebersamaan lebih dari
waktu-waktu sebelumnya.**

**Kita perlu berkolaborasi dan bersinergi, menyatukan langkah, berjuang
bersama menghadapi tantangan ketidakpastian.**

**Dengan tata kelola yang transparan, akuntabel dan berorientasi kinerja
untuk mewujudkan Indonesia maju.**



Together we can

Terima kasih